

Nomor: 2206017/FTM/VI/2026

Yogyakarta. 17 Juni 2026

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Hal : Permohonan Narasumber Akuntansi keuangan publik

Kepada Yth.

Bapak Dr. Mudasetia., M.M, Ak

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Widya Wiwaha" Yogyakarta

Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Focus Techno Media Yogyakarta merupakan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik di Yogyakarta.

Kami menyelenggarakan pelatihan bidang TI dan bidang pengembangan SDM, untuk instansi pemerintah maupun swasta, riset serta pembangunan aplikasi sistem informasi demi menunjang kinerja personil dan instansi dengan mengoptimalkan manfaat TI, adapun salah satu materi tersebut adalah **Akuntansi Sektor Publik.**

Demi menunjang penguasaan materi pelatihan tersebut kami membutuhkan pemateri / narasumber yang berkompeten tentang hal tersebut, untuk itu kami mohon bantuannya Bapak **Dr. Mudasetia Hamid, MM, Ak** untuk menjadi pemateri Akuntansi sektor publik.

Adapun kegiatan Pelatihan tersebut akan di laksanakan pada:

Hari/ Tanggal	: Jumat dan Sabtu, 24 -25 Juni 2026
Waktu	: 09.00-15.00 Wib
Tempat	: Focus Techno Media Jalan Perumnas 83, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
Kontak Person	: Rina – 0822 1777 3801

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih

Hormat Kami
Focus Techno Media



Ir. Iman Suaji
Direktur





PELATIHAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr, Mudasetia, MM., Akt

MENGAPA BELAJAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PULIK

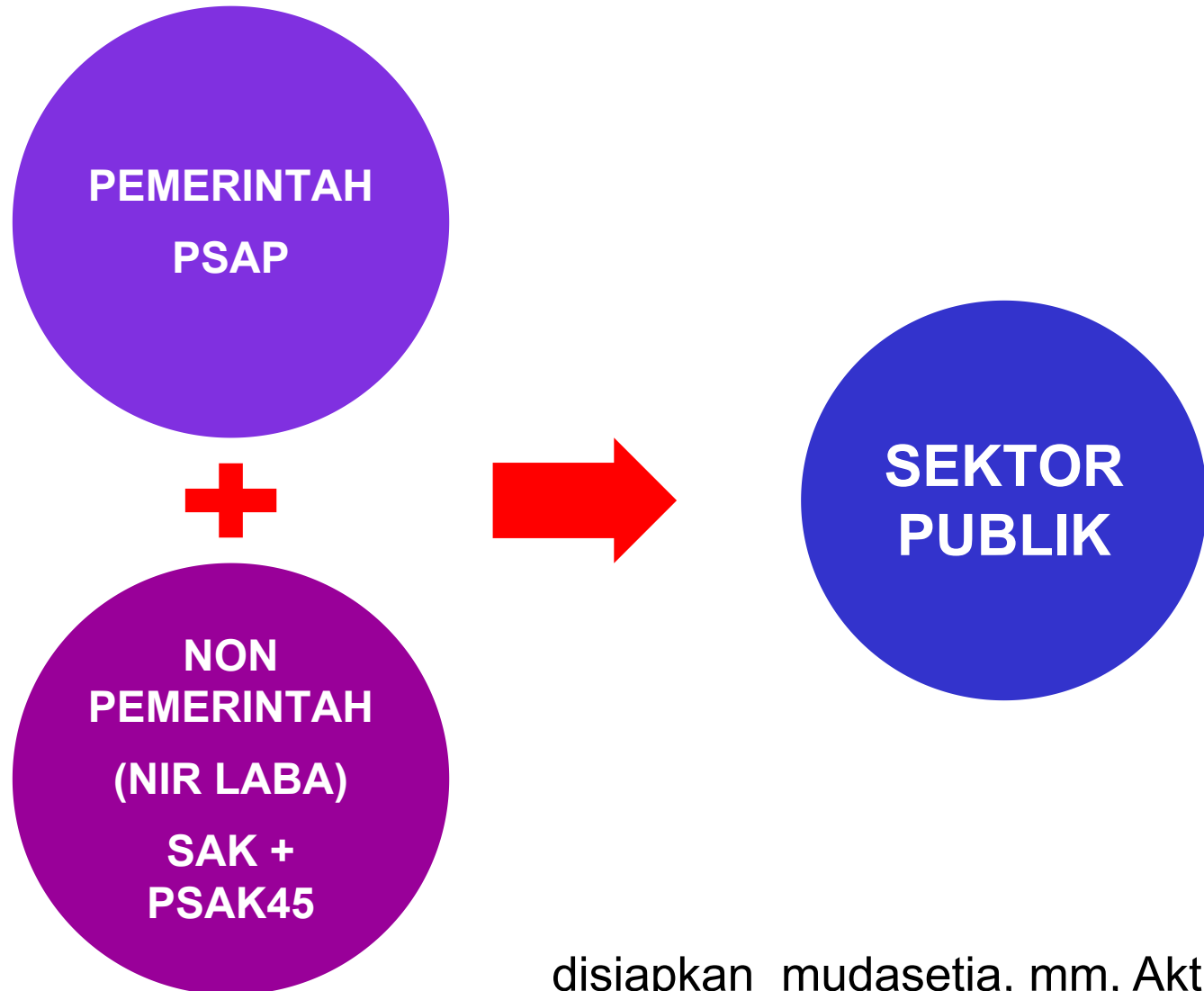
- Entitas Sektor Publik dan Pemerintah
 - Menyusun pertanggungjawaban keuangan
 - Tuntutan akuntabilitas dan transparansi
- Kewajiban sebagai warga negara
 - Memahami APBN dan Realisasi APBN
 - Memahami belanja negara digunakan untuk apa
 - Memahami penerimaan negara dari mana
- Bekerja Kantor Akuntan Publik
 - Memahami mekanisme dan sistem keuangan negara
 - Memberikan jasa konsultasi pada instansi pemerintah – penyusunan sistem, penyusunan pedoman akuntansi, kebijakan akuntansi, konsultasi manajemen
 - Melakukan audit : audit laporan keuangan atau audit operasional



APBN 2018

Uraian (triliun Rupiah)	2017	2018	% thd Outlook 2017	Selisih
	Outlook	APBN		
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.894,7	109,1	158,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.220,7	105,8	121,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(87,3)	60,5	57,0
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362,9)	(325,9)	89,8	36,9
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,67)</i>	<i>(2,19)</i>		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362,9	325,9	89,8	(36,9)
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2	93,5	(27,8)
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)	109,9	(5,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)	182,4	(3,0)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)	111,5	(0,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2	61,0	(0,1)

SEKTOR PUBLIK



ENTITAS SEKTOR PUBLIK

- Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua:
 - Pemerintahan
 - Non pemerintahan – organisasi nirlaba
- Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional.
- Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan.
- Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya rumah sakit.
- **IPSAS = International Public Sector Accounting Standard** merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector

- Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola.
- Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda.
- Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut.
- Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

Karakteristik Nirlaba

Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program

Karakteristik unik

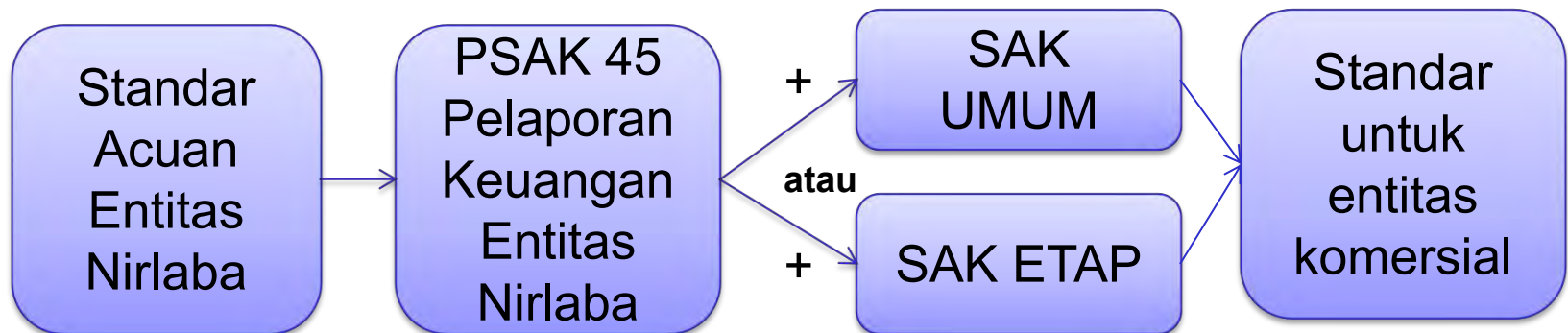
- pengguna LK entitas
- tidak ada kepemilikan, kontribusi

Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness)

Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda

Entitas Nirlaba

Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society*. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah Laporan Keuangan



Standar Akuntansi Nirlaba

Organisasi Nirlaba

Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik.
Contoh: Rumah Sakit & Universitas

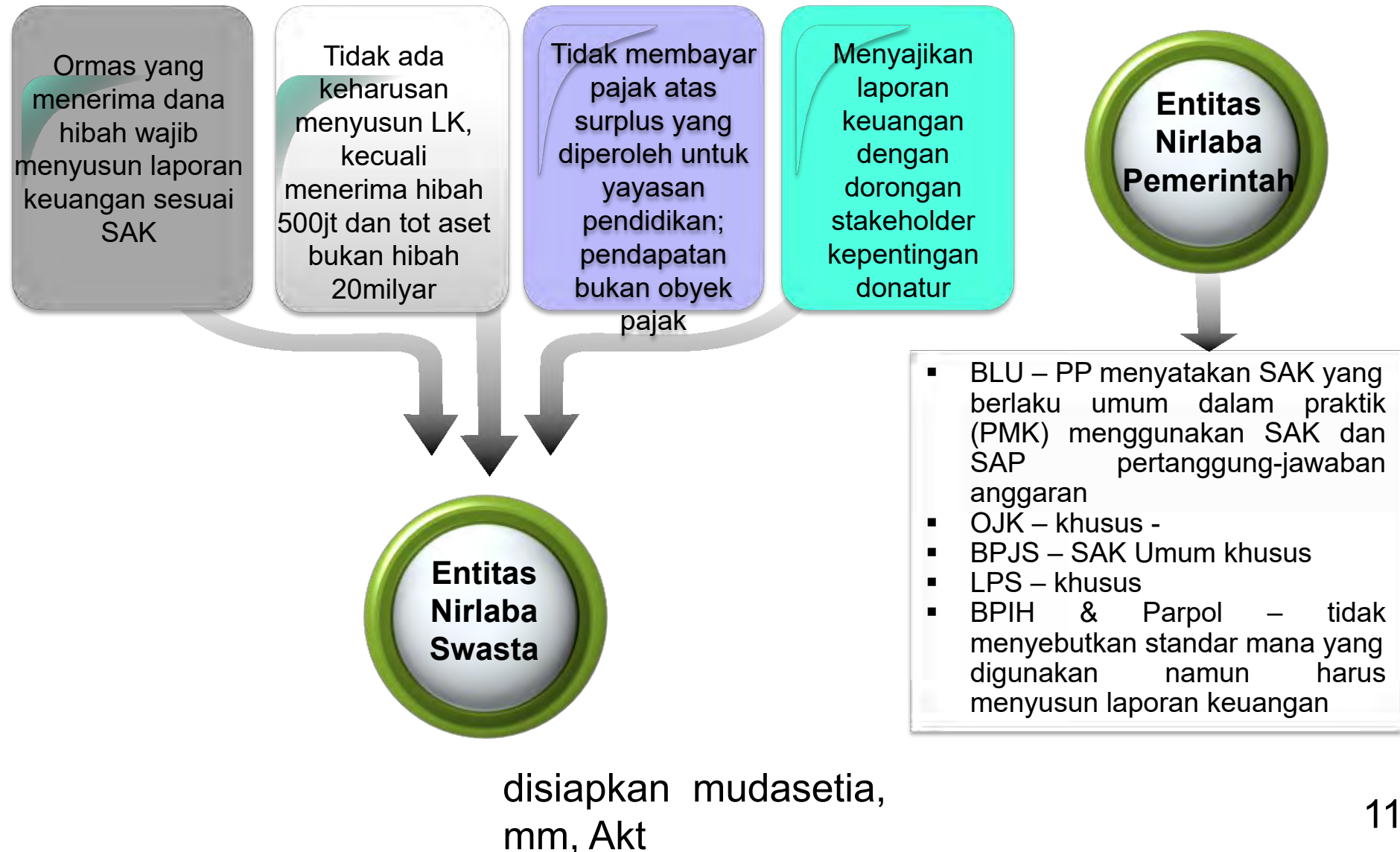
Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK

IPSAS

Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba

Banyak diadopsi dalam PSAP

Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia



Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45

Hanya mengatur
jenis-jenis
laporan
keuangan dan
ilustrasi masing-
masing laporan

- PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan
- PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan

Dikembangkan
dengan
mengadopsi
pada SFAS 117

Contoh
penerapannya
adalah pada
akuntansi
Rumah Sakit &
Universitas yang
berbentuk BLU

**PSAK
45**

Harus
diterapkan
bersamaan
dengan PSAK
atau SAK ETAP

Dapat
diterapkan pada
unit organisasi
pemerintah jika
regulasi

membolehkan
disiapkan mudasetia, mm, Akt

PSAK 45 Organisasi Nir Laba

- Mengatur pelaporan organisasi nir laba
- Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain.
- Internasional → IPSAS / International Public Sector Accounting Standards.
- Tujuan:
 - untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba.
 - Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Penerapan PSAK 45

- Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba.
- Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan

Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan

Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan

Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

- Tujuan → untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
- Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:
 - kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan
 - likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
- Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

Tujuan Laporan Aktivitas

- Tujuan utama laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai :
 - pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
 - hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain,
 - bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa,
- Informasi dalam laporan aktivitas digunakan untuk:
 - mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
 - menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa,
 - menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan Aktivitas

- Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.
- Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
- Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Laporan Arus Kas

- Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
- Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:
 - Aktivitas pendanaan:
 - penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
 - bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
 - Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Entitas Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam jutaan)

**Laporan
Posisi
Keuangan**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aset:		
Kas dan setara kas	Rp. 188	Rp. 1.150
Piutang bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi Lancar	3.500	2.500
Properti investasi	13.025	11.400
Aset Tetap	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.750
Jumlah Aset	Rp. 730.550	Rp. 696.200
Liabilitas dan Aset Neto:		
Utang dagang	Rp. 6.425	Rp. 2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan		1.625
Utang Lain-Lain	2.187	3.250
Utang wesel		2.850
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Utang jangka panjang	13.750	16.250
Jumlah Liabilitas	Rp. 26.575	Rp. 30.850
Aset Neto:		
Tidak Terikat	Rp. 288.070	Rp. 259.175
Terikat temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Terikat permanen (Catatan C)	355.055	342.500
Jumlah Aset Neto	703.975	665.350
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Rp. 730.550	Rp. 696.200

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Bentuk A

Entitas Nirlaba
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat

Pendapatan dan Penghasilan:

Sumbangan	Rp. 21.600
Jasa Layanan	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E)	2.125
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	20.570
Lain-Lain	375
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	72.170

Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):

Pemenuhan program pembatasan	29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125
Jumlah aset yang telah berakhir pembatasannya	36.850
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan lain	109.020

Beban dan Kerugian:

Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencarian dana	5.375
Jumlah Beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200
Jumlah Beban dan Kerugian	80.125

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Rp. 28.895

Laporan
Aktivitas
Bentuk A



The background image is a grayscale collage of financial and accounting-related items. It includes a close-up of a calculator's keypad with buttons for percentages, numbers, and a 'GPM' (Gross Profit Margin) button. A pie chart is visible on the left, with one segment labeled 'Member Profit & Benefits 10%'. A bar chart at the bottom shows data for the years 2004, 2005, and 2006, with values ranging from \$700 to \$900. A black pen is resting diagonally across the bottom left of the image.

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

disiapkan berdasarkan,
min, Al

Perbedaan Organisasi Pemerintahan & Bisnis

PERBEDAAN	PEMERINTAH	BISNIS
• Kepemilikan • Sudut Pandang • Sumber Legitimasi • Orientasi • Pengaruh Lingkungan • Teori-teori • Pelayanan yang Diberikan	• Eksternal • Dari Kepentingan Masyarakat • Warga Negara/ Masyarakat pada Umumnya • Pelayanan Masyarakat • Nilai-nilai dan Sistem Politik • Bersifat Lokal • Diatur Oleh Pemerintah	• Internal dan/ Eksternal • Dari kepentingan Privat • Pemilik Modal/ Pemegang Saham • Keuntungan • Terutama dari Konsumen • Bersifat Universal • Diatur oleh Mekanisme Pasar

Governance dan Agency Problem

- Adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dll) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, dan manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- Agency Problem di Pemerintahan
 - Politisi vs rakyat;
 - Politisi vs Pemerintah;
 - Pemerintah vs Rakyat
 - Ketidaksinkronan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah dan politisi, padahal sebagai pemegang kepentingan tertinggi.
 - Rakyat terpolarisasi dalam kelompok kepentingan sehingga terkadang sulit untuk mencari tahu sebenarnya “rakyat”

Reformasi Keuangan Negara

UU 17/2003 Keuangan Negara

- Pengaturan umum tentang keuangan negara

UU 1/2004 Perbendaharaan Negara

- Sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban

UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP

- Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu

UU KEUANGAN NEGARA

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

UU KEUANGAN NEGARA

- Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang **pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR** berupa **laporan keuangan** yang telah diperiksa oleh **Badan Pemeriksa Keuangan**, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi :
 - Laporan Realisasi APBN
 - Neraca
 - Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

UU KEUANGAN NEGARA

- Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara.
- Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara
 - dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
 - dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga
 - diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD
- Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain.

UU KEUANGAN NEGARA

- Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan **standar akuntansi pemerintahan**.
- Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu **komite standar yang independen** dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- Ketentuan mengenai **pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual**. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas

UU PERBENDAHARAAN NEGARA

- Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
- Pejabat perbendaharaan negara
 - Pengguna Anggaran
 - Bendahara Umum Negara/Daerah
 - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
- Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah
- Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah
- Pengelolaan uang
- Pengelolaan piutang dan utang

UU PERBENDAHARAAN NEGARA

- Pengelolaan investasi
- Pengelolaan barang milik negara/daerah
- Larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah
- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD
- Pengendalian interm pemerintah
- Penyalahgunaan uang dan negara
- Pengelolaan keuangan badan umum

UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan **keuangan**, pemeriksaan **kinerja**, dan pemeriksaan dengan **tujuan tertentu**.
- Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan **standar pemeriksaan**.
- Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
- Isi UU
 - Lingkup pemeriksaan
 - Pelaksanaan Pemeriksaan
 - Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut
 - Pengadaan Ganti Kerugian Negara
 - Ketentuan Pidana

Standar Akuntansi Pemerintahan

- Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:
 - Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga
 - Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupaten, Kota
 - Badan Layanan Umum
- Berbentuk Peraturan Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.
- Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS)
- Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba

DASAR HUKUM

Psl 17 UU17/2003

- Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 36 ayat (1) UU 17/2003

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP Nomor 71 Tahun 2010)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

**DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU BAGI
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH**

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Disertai Publikasi Lainnya

Interpretasi PSAP (IPSAP)

- IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

Buletin Teknis

- Buletin Teknis merupakan arahan/pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP.

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

KONSEP BASIS AKRUAL

BASIS	KONSEPSI	PENGAKUAN
BASIS AKRUAL	Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, <u>tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan</u>	▪ Pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh (<i>earned</i>) ▪ Beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	Judul PSAP
	Kerangka Konseptual
PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03	Laporan Arus Kas
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05	Akuntansi Persediaan
PSAP 06	Akuntansi Investasi
PSAP 07	Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP 09	Akuntansi Kewajiban
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12	Laporan Operasional
PSAP 13	Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
PSAP 06	Akuntansi Investasi (Revisi 2016)

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	Interpretasi PSAP
Interpretasi No 1	Transaksi Mata Uang Asing
Interpretasi No 2	Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 3	Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 4	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

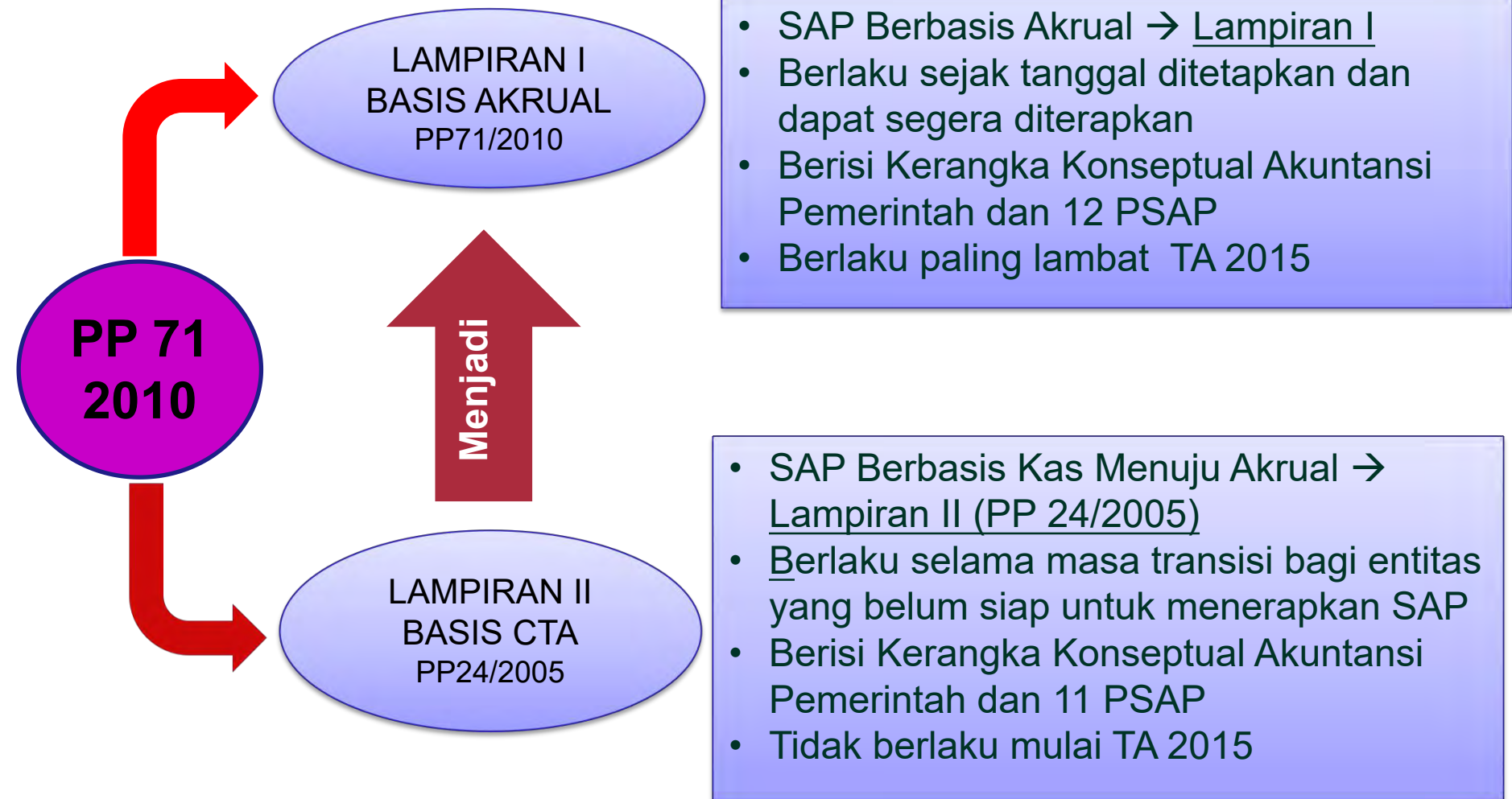
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Bultek	Tahun	Keterangan
01	Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap	2014	Mengganti Bultek 09
02	Bultek 16 Akuntansi Piutang	2014	Mengganti Bultek 16
03	Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud	2014	Mengganti Bultek 11
04	Bultek 18 Akuntansi Penyusutan	2014	Mengganti Bultek 05
05	Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial	2015	Mengganti Bultek 10
06	Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara	2015	Bultek Baru
07	Bultek 21 Akuntansi Transfer	2015	Bultek Baru
08	Bultek 22 Akuntansi Utang	2015	Bultek Baru
09	Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)
10	Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

PENGATURAN PP 71 / 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan Keuangan menurut SAP Akrual

- Laporan Operasional
- Neraca
- Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan SAL

Laporan Desa

- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Neraca Desa
- Catatan atas Laporan Keuangan Desa

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL

- **Basis akrual** adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
- Pendapatan diakui pada saat hak telah **diperoleh** (*earned*) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban **timbul** atau sumber daya dikonsumsi

- **Basis kas** adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan secara lengkap → hanya Kas



KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan



LAPORAN PERUBAHAN SAL

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 - Saldo Anggaran Lebih awal,
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
 - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya,
 - Saldo Anggaran Lebih Akhir.

disiapkan mudasetia,
mm, Akt



PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)



NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

LAPORAN OPERASIONAL

- LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
 - Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 - Beban dari kegiatan operasional
 - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
 - Pos luar biasa, bila ada
 - Surplus/defisit-LO



STRUKTUR DAN ISI LO



- **Menyajikan berbagai unsur**
 - pendapatan-LO,
 - beban,
 - surplus/defisit dari operasi,
 - surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
 - surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
 - pos luar biasa,
 - surplus/defisit-LO,
- Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar

LAPORAN OPERASIONAL

- Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan.
- Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja
- Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga :
 - Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan
 - Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu
 - Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.
- Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx



disiapkan mudasetia, mm, Akt

PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)

24	<u>BEBAN</u>				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
40					
41	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	<u>POS LUAR BIASA</u>				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	SURPLUS/DEFISIT-LD (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - ekuitas awal,
 - surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
 - ekuitas akhir.
- Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.



PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)

1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		
3	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX



TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL

- **TRANSAKSI KAS → PELAKSANAAN ANGGARAN**

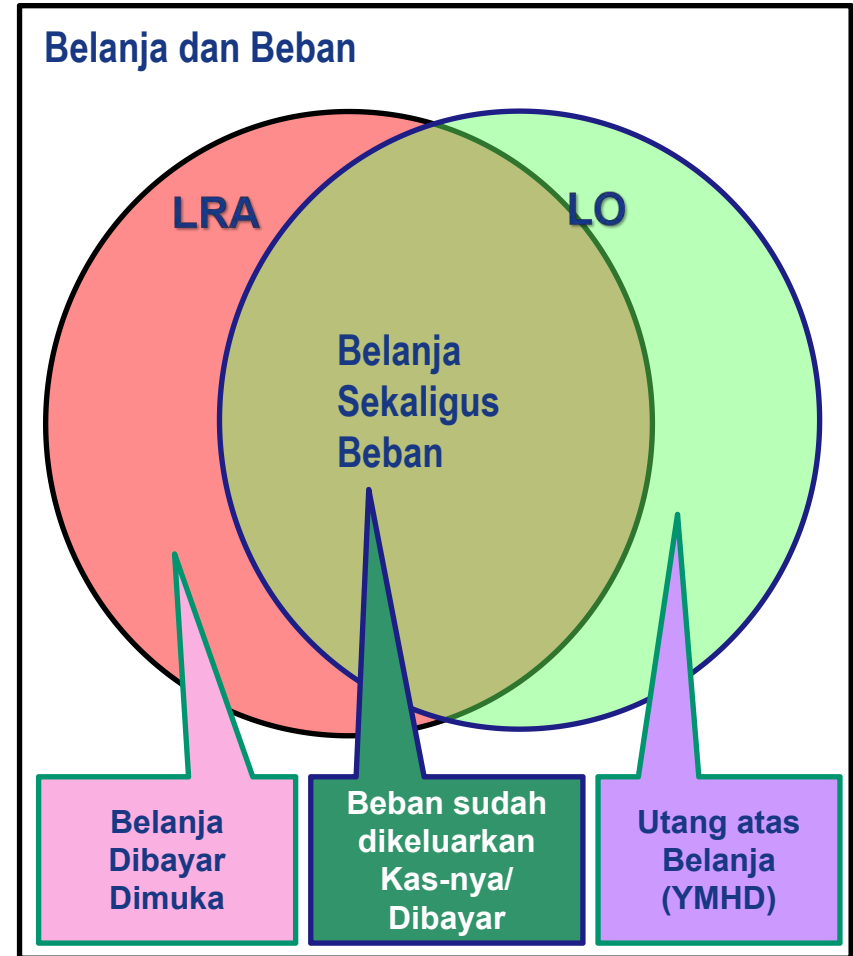
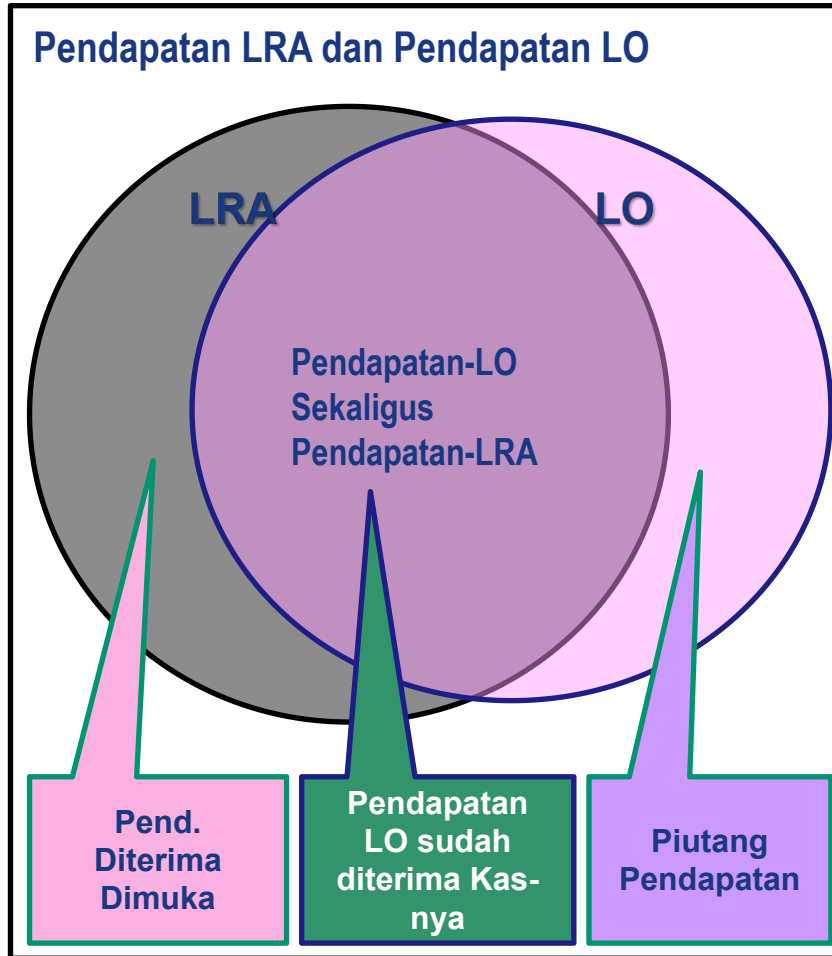


TRANSAKSI AKRUAL

- Pendapatan masih harus diterima
- Pendapatan diterima dimuka
- Beban yang masih harus dibayar
- Beban dibayar dimuka
- Beban Penyusutan



PENYESUAIAN KAS - AKRUAL

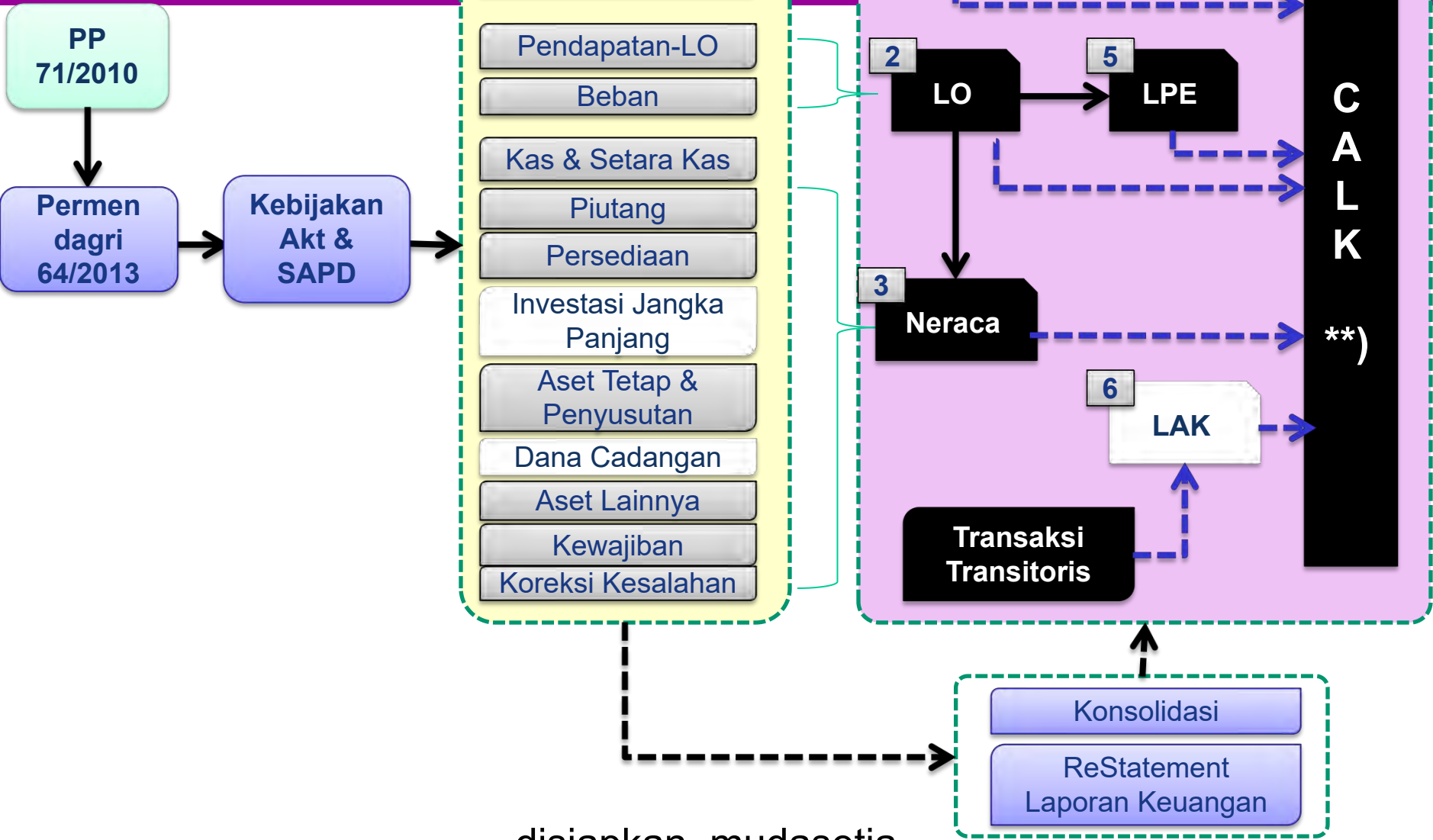


APLIKASI AKRUAL DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

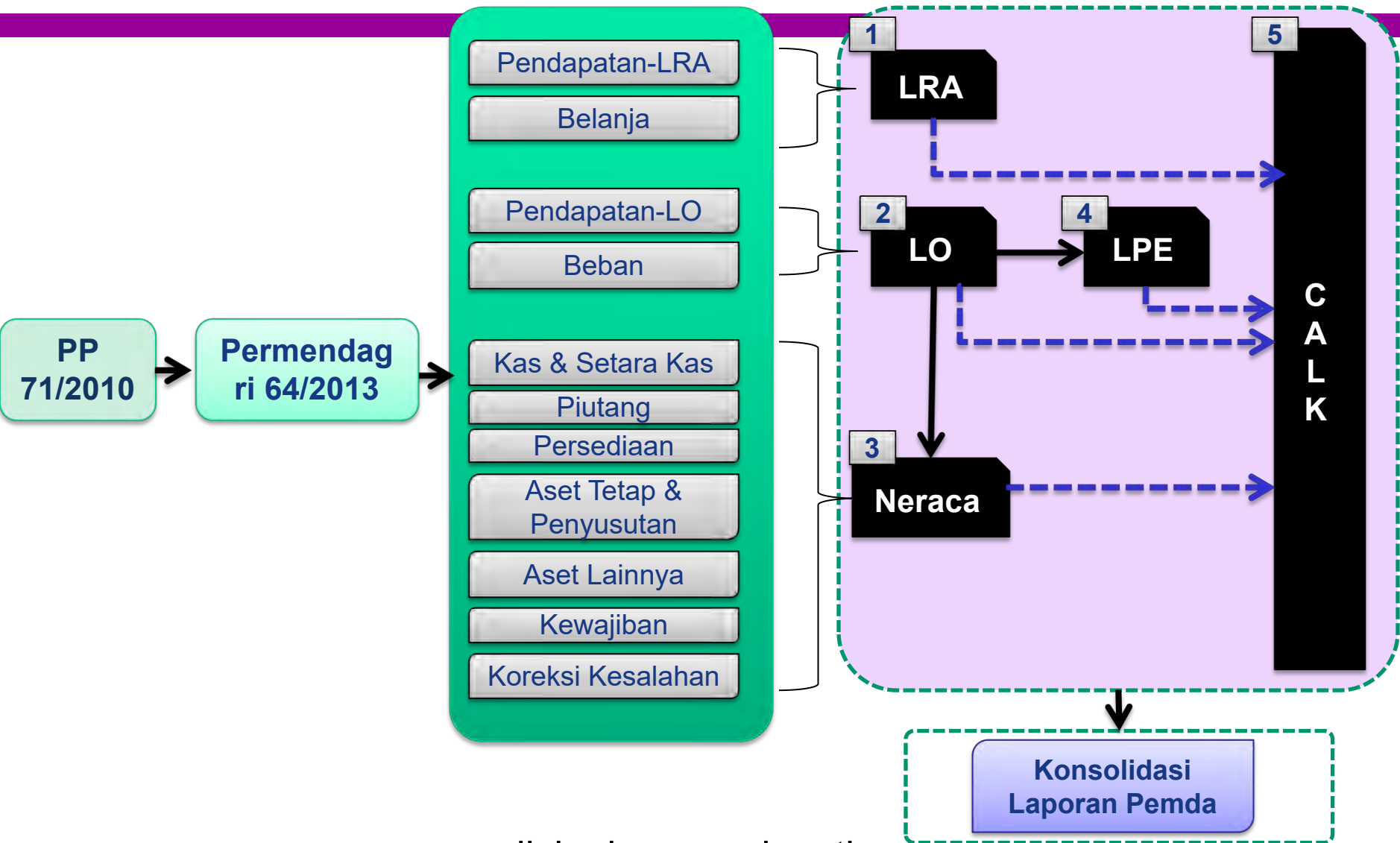
- Tujuan → pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.
- Ruang lingkup → kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS.
- Permendagri dilengkapi dengan :
 - Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
 - Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD
 - Lampiran III : Bagan Akun Standar
 - Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA
- Ketentuan Umum
- Tujuan
- Ruang Lingkup
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Bagan Akun Standar
- Ketentuan Lain-lain

LAPORAN KEUANGAN PEMDA



disiapkan mudasetia,
mm, Akt

LAPORAN KEUANGAN SKPD



disiapkan mudasetia,
mm, Akt

IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6): STANDAR DAN SISTEM

- (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

Peraturan – Pemerintah Pusat

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH:

- PP 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintah (*lampiran I*)
- Bultek PSAP:
 - Bultek 15: Aset Tetap Akrua
 - Bultek 16: Piutang Akrua
 - Bultek 17: Aset tak Berwujud Akrua
 - Bultek 18: Penyusutan Akrua
- Akan terbit:
 - PSAP Badan Layanan Umum
 - Bultek Pendapatan Non Perpajakan
 - Bultek Pendapatan Perpajakan

PERATURAN TERKAIT IMPLEMENTASI AKUNTANSI DI PEMERINTAH PUSAT

PMK 215 Tahun 2016 mengganti PMK 213 Tahun 2013

- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

PMK 214 Tahun 2013

- Bagan Akun Standar

PMK 215 Tahun 2013

- Jurnal Akuntansi Pemerintah

PMK 224 Tahun 2016 pengganti PMK 219 Tahun 2013

- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

PMK 225 Tahun 2016 pengganti PMK 270 Tahun 2014

- Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

PMK 222 Tahun 2016 pengganti PMK 177 Tahun 2015

- Pedoman Penyusunan LKKL

PMK 221 Tahun 2016 pengganti PMK 216 Tahun 2015

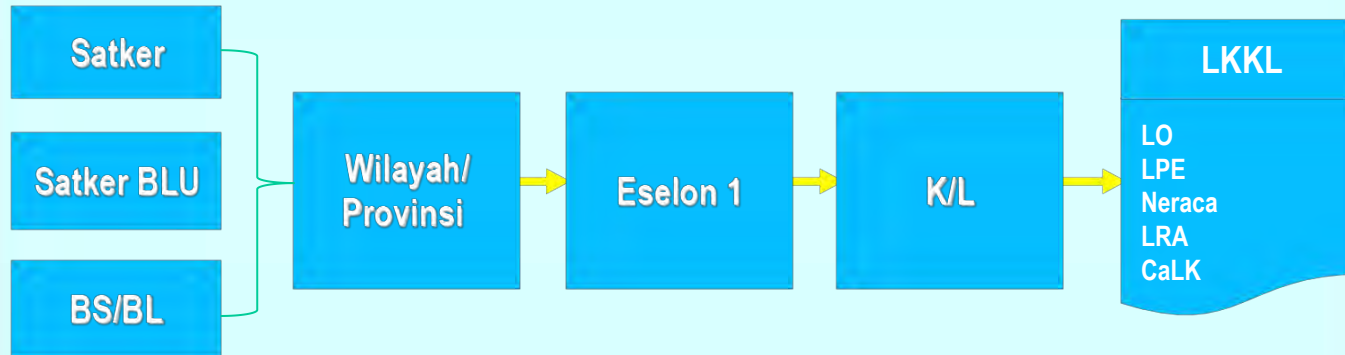
- Penyusunan dan Penyampaian LK BUN

disiapkan mudasetia,
mm, Akt

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PP)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)



DPR



Presiden

LKPP:

1. LRA
2. LO
3. LPE
4. Neraca
5. LAK
6. LP SAL
7. CaLK

KONSOLIDASI

BUN

LKBUN

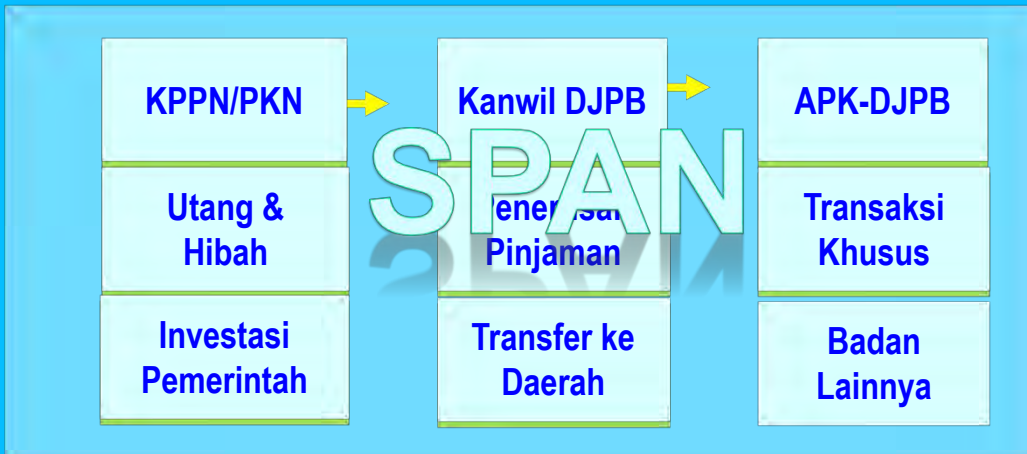
Lap. Arus Kas
LRA
LPE
LPSAL
Neraca
CaLK

BPK



Sistem Akuntansi BUN

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA



disiapkan mudasetia,
mm, Akt

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2015

PEMERINTAH DAERAH

LKPD	OPINI								JML
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	28%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	59%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	343	66%	26	5%	119	23%	524
2011	67	13%	349	67%	8	2%	100	19%	524
2012	120	23%	319	61%	6	1%	79	15%	524
2013	156	30%	311	59%	11	2%	46	9%	524
2014	252	47%	247	46%	5	1%	35	6%	539
2015	312	59%	187	35%	3	1%	30	6%	532

Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
disiapkan mudasetia,
mm, Akt

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2015

PEMERINTAH PUSAT

LKPD	OPINI								JML
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
2009	42	58%	24	33%	0	0%	7	10%	73
2010	50	65%	25	32%	0	0%	2	3%	77
2011	61	76%	17	21%	0	0%	2	3%	80
2012	62	71%	22	25%	0	0%	3	3%	87
2013	65	75%	19	22%	0	0%	3	3%	87
2014	62	71%	18	21%	0	0%	7	8%	87
2015	56	65%	26	30%	0	0%	4	5%	86

Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014:

*“opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai **good governance** dalam pengelolaan keuangan pemerintah”.*

disiapkan mudasetia,

mm, Akt

Nomor: 26021/FTM/III/2026

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Hal : Ucapan terima kasih kepada Narasumber Pelatihan

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian pada Masyarakat

STIE "Widya Wiwaha" Yogyakarta

Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Kami telah menyelenggarakan pelatihan bidang TI dan bidang pengembangan SDM, untuk instansi pemerintah maupun swasta, riset serta pembangunan aplikasi sistem informasi demi menunjang kinerja personil dan instansi dengan mengoptimalkan manfaat TI.

Salah satu materi tersebut adalah Akunyansi Sektor Publik. dengan Pemateri/ narasumber oleh Bapak Dr. Muda Setia, MM., Ak

Adapun kegiatan Pelatihan tersebut akan di laksanakan pada:

Hari/ Tanggal	: Rabu dan Kamis, 24 - 26 Juni 2026
Waktu	: 09.00-15.00 Wib
Tempat	: Focus Techno Media Jalan Perumnas 83, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
Kontak Person	: Rina - 0822 1777 3801

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muda Setia, M M., Ak. Atas ketersediaannya menjadi pembicara pada acara tersebut

Hormat Kami,

Focus Techno Media



Ir. Iman Suaji
Direktur